

**Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Belanja Bantuan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Jawa Timur**

**Nurdiana Fitri Isnaini<sup>1</sup>, Rini Armin<sup>2</sup>, Arieza Dwi<sup>3</sup>**  
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Majapahit  
Email : [nurdiana.fitri0278@gmail.com](mailto:nurdiana.fitri0278@gmail.com)

**Abstrack**

*As the world's fifth most populous country, Indonesia has a lot of potential to improve the welfare of its people, including the conditions in East Java. However, with the outbreak of the Covid 19 pandemic, all strategic planning that had been made to improve economic performance had to be redesigned. The spread of the Covid 19 virus has been successfully suppressed, but its economic impact continues to be felt by the middle and lower classes. The government is trying to continue to overcome the economic impact of the pandemic by taking various approaches, starting from the micro-economic scale to the macro-economic scale. This research will see how far the influence of Regional Original Income (PAD), Capital Expenditures, Social Assistance Expenditures and Economic Growth variables on Regional Financial Performance in East Java. The research method uses quantitative analysis of testing with the help of the SPSS application. The results of data processing show that the variables PAD, capital expenditure and economic growth have a significant effect on regional financial performance while one social assistance expenditure variable has no significant effect on regional financial performance. The social assistance expenditure variable has no effect due to the condition of the ineffectiveness of the assistance program in terms of the proportion of the number of beneficiaries, the nominal amount and the conditional process of beneficiaries*

**Keywords : Influence, financial performance, ineffectiveness**

**Abstrak**

Sebagai negara berpenduduk padat kelima dunia, Indonesia memiliki banyak potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, tak terkecuali kondisi di Jawa Timur. Tetapi dengan adanya wabah pandemi covid 19 semua perencanaan strategi yang telah dibuat untuk meningkatkan kinerja perekonomian harus dirancang ulang. Penyebaran virus covid 19 sudah berhasil ditekan penularannya, tetapi dampaknya secara ekonomi masih terus dirasakan oleh masyarakat menengah kebawah. Pemerintah berupaya untuk terus menanggulangi dampak ekonomi pandemi dengan melakukan berbagai pendekatan mulai dari skala ekonomi mikro sampai skala ekonomi makro. Penelitian ini akan melihat sejauh mana pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Belanja Bantuan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Jawa Timur. Metode penelitian menggunakan analisis kuantitatif pengujian dengan bantuan aplikasi SPSS. Hasil olah data diketahui bahwa variabel PAD, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah sementara satu variabel belanja bantuan sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Variabel belanja bantuan sosial tidak berpengaruh karena adanya kondisi ketidakefektifan program bantuan dalam hal

proporsi jumlah penerima bantuan, besaran nominal dan proses bersyarat penerima bantuan

**Kata Kunci : Pengaruh, kinerja keuangan, ketidakefektifan**

## **PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk 5 besar dunia sangat terdampak dengan adanya wabah covid 19 tak terkecuali provinsi Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi yang dibebepa tahun sebelumnya mengalami kenaikan signifikan menjadi menurun secara masif. Penurunan disebabkan karena banyak pekerja dirumahkan, para pelajar yang harus belajar dirumah, tempat wisata harus tutup tak terkecuali restoran tempat makan, kafe bahkan pedagang kaki lima juga tidak boleh berjualan bebas demi menghambat penyebaran virus covid 19. Pendapatan Asli daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan secara signifikan, seperti Kota Surabaya ditahun 2019 pencapaian PAD sebesar 5,38T ditahun 2020 menurun menjadi 4,28T turun sebesar 27% hal ini berdampak pada menurunnya kualitas layanan pemerintah dalam memberikan manfaat bagi masyarakatnya. Sebagaimana fungsi dari penyelenggaraan negara adalah mencukupi kebutuhan masyarakatnya selaras dengan tujuan otonomi daerah serta desentralisasi fiskal yang membawa misi utama dalam pelaksanaannya ; menumbuhkan kesejahteraan masyarakat serta mengembangkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat, pengelolaan sumber daya di daerah menciptakan efisiensi dan efektifitas serta adanya partisipasi dalam pembangunan akan tercipta ruang bagi masyarakat

Pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Undang Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memberikan peluang tiap daerah untuk menjadikan keuangan daerah lebih longgar dalam mengatur proporsi alokasi sehingga lebih mandiri tidak tergantung dengan keuangan pusat karena sumber daya milik daerah dikendalikan secara penuh oleh daerah masing-masing akan lebih optimal bagi peningkatan pelayanan daerah kepada masyarakatnya. Dalam mengelola keuangan daerah variabel yang berperan penting adalah PAD yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dari aktifitas ekonominya sesuai undang-undang yang berlaku untuk membiayai aktivitas masyarakat sesuai ptensi daerah sebagai wujud dari desentralisasi. Pertumbuhan PAD secara positif akan sangat mempengaruhi peningkatan kualitas layanan dan kemandirian daerah terhadap pusat sehingga akan memudahkan pemerintah pusat didalam meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di wilayah Indonesia tanpa terkecuali.

Kinerja keuangan sebagai salah satu indikator pemerintah dalam menilai keberhasilan kinerja pemerintah daerah akan ditentukan oleh pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) yang dikelola secara kredibel. Jika APBD dikelola dengan baik maka kinerja keuangan daerah berjalan sehat sehingga mampu membiayai pelaksanaan otonomi. Analisis rasio keuangan terhadap APBD merupakan alat untuk mengidentifikasi kinerja keuangan pemerintah daerah telah ditetapkan dan dilaksanakan. Selaras dengan penelitian Ariska (2021) PAD memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah, Chrisna Dwi Heryanti (2019) PAD memberikan pengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan daerah.

Kemandirian daerah akan mempengaruhi pemerintah daerah dalam mengalokasikan keuangan membiayai aktivitas masyarakatnya. Semakin mandiri daerah akan semakin bebas dari intervensi pemerintah pusat, sehingga akan semakin mampu mengatur alokasi dana ke sektor-sektor optimal. Dengan kondisi wabah covid 19 melanda, pemerintah daerah lebih memiliki kebebasan finansial untuk membantu masyarakatnya dalam bertahan menghadapi gelombang dengan jaring sosial. Dana jaring sosial sebagai penguat masyarakat sangat berperan didalam mengembalikan stabilitas ekonomi dimasa dan pasca pandemi. Jaring sosial sebagai support utama bagi masyarakat menengah kebawah untuk tetap bertahan ditengah gempuran dampak virus covid 19 yang sangat mematikan sendi perekonomiannya.

Melihat kondisi dimasa dan pasca covid 19 dipandang perlu melihat pengaruh beberapa variabel yang akan berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi daerah diantaranya adalah variabel ; Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal dan pertumbuhan ekonomi. Dengan diketahui pengaruh ketiga variabel tersebut diharapkan ada strategi baru oleh pemerintah daerah didalam meningkatkan kinerja keuangan daerah sehingga mempercepat resiliensi pemulihan ekonomi pasca covid 19 di wilayah Jawa timur . Berdasar uraian diatas maka dilakukan penelitian dengan judul **Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, Belanja Bantuan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kinerja Keuangan Daerah di Jawa Timur** sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah terkait didalam merumuskan strategi.

### **RUMUSAN MASALAH**

Pentingnya mengukur pengaruh variabel PAD, belanja modal dan belanja bantuan sosial terhadap kinerja keuangan daerah adalah untuk mengetahui seberapa besar dampak yang ditimbulkan variabel-variabel tersebut didalam proses pembangunan perekonomian suatu daerah. Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang diangkat adalah;

- (1) Apakah variabel PAD, belanja modal, belanja bantuan sosial dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja keuangan daerah di Jawa Timur.
- (2) Bagaimanakah analisis pengaruh belanja bantuan sosial terhadap kinerja keuangan daerah

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Indonesia sebagai negara dengan penduduk lebih dari 200juta memiliki kekuatan ekonomi yang cukup besar adalah urutan ke-16 dunia sehingga Indonesia menjadi anggota G-20 (Kelompok dua puluh). Indonesia juga menduduki peringkat ekonomi ke-6 Asia Tenggara setelah Tiongkok, Jepang, Rusia, India dan Korea Selatan. Di tahun 2019 pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan pertumbuhan perekonomiannya tetapi terkendala dengan munculnya pandemi covid 19 yang berdampak sangat masiv hingga ke seluruh dunia. Segala upaya diterapkan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kesehatan dan ekonomi dampak pandemi sehingga di tahun 2021 perekonomian Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup menggembirakan seiring dengan meredanya penyebaran virus.

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan asli daerah adalah indikator untuk menilai kemandirian keuangan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan sah lainnya. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 membahas tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 membahas tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa sumber pendapatan di daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak. Sumber PAD antara lain ;

Hasil pajak daerah, yakni iuran yang digunakan oleh individu maupun badan kepala daerah yang tidak ada imbalan yang seimbang berdasarkan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Pajak daerah terdiri atas :

Pajak Provinsi antara lain ; (a) Pajak kendaraan bermotor, (b) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, (c) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah serta Permukaan Air, (d) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pajak Daerah di Kabupaten ; (a) Pajak Hiburan, (b) Pajak Hotel, (c) Pajak Parkir, (d) Pajak Restoran, (e) Pajak Reklame, (f) Pajak Penerangan Jalan, (g) Pajak Tanah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan serta Perkotaan, (h) Pajak Sarang Burung Walat, (i) Pajak Mineral Bukan Logam serta Batuan, (j) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Retribusi daerah adalah tarif untuk membayar jasa ataupun ijin yang diberikan pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan. Retribusi dibagi 3 jenis adalah ; (a) retribusi jasa umum adalah pungutan pelayanan yang disediakan pemerintah untuk kepentingan serta manfaat umum yang bisa dipakai orang pribadi maupun badan. Retribusi jasa umum antara lain; retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pemakaman, retribusi KTP dan akte catatan sipil, retribusi kebersihan, retribusi parkir ditepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pengendalian menara komunikasi, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi pengolahan limbah cair. (b) retribusi jasa usaha adalah pungutan dari pelayanan yang telah diberikan pemerintah daerah meliputi pelayanan daerah menggunakan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan, serta pelayanan pemerintah yang belum diberikan secara memadai oleh pihak swasta. Retribusi jasa usaha antara lain; retribusi pasar atau pertokoan, retribusi penjalan produksi usaha daerah, retribusi terminal, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi rumah potong hewan, retribusi penyebrangan di air, retribusi tempat penginapan, retribusi pelayanan kepelabuhan. (c) retribusi perizinan tertentu yakni pungutan pelayanan perizinan tertentu dari pemerintah daerah untuk orang pribadi maupun badan guna mengatur serta mengawasi kegiatan pemakaian ruang, pemakaian sumberdaya alam, barang, prasarana, serta fasilitas tertentu untuk mengamankan kepentingan umum serta menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi perizinan tertentu antara lain; retribusi izin gangguan, retribusi izin usahaperikanan, retribusi izin penjalan minuman beralkohol, retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek.

Hasil perusahaan milik daerah serta hasil pengurusan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, badan usaha milik daerah (BUMD) bersama dengan sektor swasta diharapkan dapat berkontribusi bagi daerah sehingga bisa menunjang kemandirian daerah dalam membangun ekonomi daerah.

Lain-lain pendapatan yang sah, untuk mendanai belanja daerah yang diusahakan daerah dengan cara normal dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku.

Sehingga bisa disimpulkan PAD adalah semua penerimaan yang bersumber asli berasal dari suatu daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMN, serta penerimaan lain yang sah. Semakin besar PAD maka akan semakin mandiri suatu daerah sehingga akan semakin meningkatkan kinerja daerah tersebut.

### **Belanja Modal**

Belanja modal adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dari anggaran belanja yang tidak habis selama satu tahun yang menciptakan aset tetap pemerintah. Aset tetap tersebut akan berupa fasilitas kepada masyarakat. Secara umum setiap tahun akan ada pengadaan aset tetap untuk fasilitas publik yang berdampak pada finansial secara jangka panjang. Belanja modal dibutuhkan pemerintah untuk menyediakan aset tetap misalnya biaya pembelian barang modal seperti tanah, gedung, mesin, kendaraan, peralatan, instalasi serta jaringan, furniture, software dan lain sebagainya. Dalam peraturan pemerintah No.71 tahun 2010 tentang standar akuntansipemerintahan, belanja modal terdiri dari 5 kategori utama : (1) Belanja tanah, yakni pengeluaran yang digunakan untuk pembelian / pembebasan penyelesaian, balik nama serta sewa tanah, pembuatan sertifikat, pematangan tanah, pengosongan, serta pengeluaran lainnya yang berhubungan dengan perolehan hak atas tanah, hingga tanah bisa digunakan. (2) Belanja peralatan dan mesin, adalah pengeluaran untuk pertambahan / penggantian serta pengembangan kapasitas alat dan mesin yang digunakan, hingga dalam kondisi siap digunakan. (3) Belanja bangunan dan gedung, adalah biaya untuk pembangunan / penambahan / penggantian gedung serta bangunan yang meningkatkan kapasitas, hingga gedung siap untuk digunakan. (4) Belanja jalan, irigasi, dan jaringan, adalah pembangunan maupun perawatan sarana serta prasarana jaringan pengairan, jaringan instalasi distribusi listrik dan jaringan telekomunikasi serta jaringan lain sebagai saran prasaran fisik distribusi instalasi, hingga dalam kondisi siap untuk digunakan. (5) Belanja modal fisik lainnya, adalah segala dana dalam pembangunan maupun perawatan terhadap belanja fisik lain yang tidak bisa diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, jaringan, gedung dan bangunan, termasuk belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang kesenian, barang purbakala ataupun barang untuk keperluan museum, hewan ternak dan tanaman, serta buku dan jurnal ilmiah.

Kategori belanja modal antara lain sebagai berikut: (1) Terdapat perolehan aset tetap maupun aset lainnya yang membuat bertambahnya asset Pemda, yang merupakan akibat dari pengeluaran. (2) Pihak Pemda telah menetapkan pengeluaran tersebut melebihi batas minimal dari kapasitas aset tetap maupun aset lain. (3) Pendapatan aset tetap tersebut diniatkan tidak untuk dijual kembali.

### **Belanja bantuan Sosial**

Menurut Pemendagri No. 39 Tahun 2012 bantuan sosial merupakan uang maupun barang yang diberikan pemerintah daerah untuk keluarga atau masyarakat bersifat tidak terus menerus yang tujuannya melindungi dari resiko social. Masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial antara lain ; (1) keluarga atau masyarakat yang keadaannya tidak stabil akibat dari krisis sosial, bencana alam

maupun fenomena alam. (2) lembaga bukan pemerintahan dalam bidang keagamaan, pendidikan serta lainnya untuk melindungi keluarga, individu atau masyarakat dari resiko sosial.

Penganggaran bantuan sosial merupakan proses awal dalam pengelolaan bantuan sosial, yang urutannya antara lain ; (1)Kelompok/perwakilan anggota menyampaikan usulannya secara tertulis untuk kepala daerah. (2) Kepala daerah menunjukkan SKPD berkaitan dengan pelaksanaan evaluasi usulan secara tertulis. (3) Kepala SKPD mengungkapkan hasil evaluasinya untuk kepala daerah melalui TAPD. (4) TAPD mempertimbangkan rekomendasi sesuai kemampuan serta prioritas keuangan daerah. (5) Dasar pencantuman alokasi dari anggaran bantuan sosial atas rancangan KUA serta PPA adalah kepala SKPD serta pertimbangan dari TAPD. (6) Pencantuman alokasi anggaran yang meliputi anggaran bantuan sosial yang berupa uang maupun berupa barang. (7) Bantuan sosial yang berwujud uang tercantum dalam RKA-PPKD. (8) Bantuan sosial yang berwujud barang tercantum dalam RAK-PPKD. (9) Sesuai dengan perundang-undangan RKA-PPKD dan RKA-SKPD adalah dasar dari penganggaran bantuan sosial dalam APBD. (10) Kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, serta rincian obyek belanja akan pada PPKD merupakan anggaran bantuan sosial berupa uang. (11) Kelompok belanja langsung diformasikan dalam program kegiatan, diuraikan dalam jenis belanja barang serta jasa, obyek dari belanja bantuan sosial diserahkan pada masyarakat, serta rincian dari obyek belanja bantuan sosial diserahkan pada masyarakat berhubungan dengan SKPD merupakan anggaran bantuan berupa barang. (12) Rincian obyek belanja disertakan nama penerima serta nominal bantuan sosial yang diberikan.

Langkah selanjutnya yaitu merealisasikannya melalui proses pelaksanaan dan penatausahaan bantuan sosial diantaranya adalah; (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial yang berupa uang atas dasar DPA- PPKD. (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial yang berupa barang atas dasar DPA- SKPD. (3) Daftar penerima serta nominal bantuan yang diberikan ditetapkan kepala daerah sesuai dengan peraturan daerah yang membahas tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran dari APBD. (4) Pembagian bantuan sosial sesuai daftar yang tercantum dalam keputusan kepala daerah. (5) Pencairan bantuan sosial yang berupa uang dapat dilaksanakan dengan pembayaran langsung. (6) Pencairan dilakukan melalui mekanisme tambah uang untuk bantuan sosial yang berupa uang yang nilainya sampai dengan Rp 5.000.000,00. (7) Penyaluran bantuan sosial dilengkapi kuitansi bukti penerimaan berupa uang bantuan sosial.

Setelah merealisasikan bantuan sosial, langkah selanjutnya adalah pelaporan dan pertanggung jawaban bantuan sosial, antara lain sebagai berikut ; (1) Penerima bantuan yang berupa uang memberi laporan atas penggunaan bantuan sosial untuk kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait. (2) Penerima bantuan yang berupa barang melaporkan penggunaan atas bantuan kepada kepala SKPD terkait. (3) Bantuan yang berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja pada PPKD sesuai dengan tahun anggaran yang berkenaan. (4) Bantuan yang berupa barang dicatat sebagai realisasi dari obyek belanja pada jenis belanja barang maupun jasa dalam kegiatan pada SKPD terkait. (5) Penerima bantuan bertanggung jawab secara formal serta material dari penggunaan bantuan yang diterima.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Perkembangan perekonomian yang mengakibatkan peningkatan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu daerah bisa disebut sebagai pertumbuhan ekonomi. Sebagai salah satu ukuran yang menunjukkan sejauh mana aktifitas perekonomian negara yang berdampak pada meningkatnya pendapatan masyarakatnya, pertumbuhan ekonomi sangat menentukan pertumbuhan pendapatan nasional suatu negara.

Faktor yang memberikan pengaruh pertumbuhan ekonomi Indonesia antara lain ; (1) Faktor produksi, memanfaatkan tenaga kerja yang ada serta menggunakan bahan baku industry local dengan sebaik mungkin. (2) Faktor perdagangan luar negeri serta neraca pembayaran, harus surplus sehingga mampu menambah cadangan devisa sehingga nilai rupiah menjadi stabil. (3) Faktor investasi, dengan membuat kebijakan yang berpihak pada pasar dan tidak tidak rumit. (4) Fator kebijakan moneter dan inflasi, kebijakan tingkat suku bunga serta nilaitukar rupiah harus diantisipasi serta diterima di pasar. (5) Faktor keuangan negara, kebijakan fiskal mampu mendanai pengeluaran pemerintah.

### **Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan adalah hasil kinerja keuangan satu daerah dengan menggunakan kualitas dan kuantitas yang terukur. Pemendagri No.13 Tahun 2006 pasal 1 ayat 37 tentang pengelolaan keuangan daerah, kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran untuk melihat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Pengukuran kinerja adalah penilaian dari pencapaian target yang dilakukan dari tujuan strategis organisasi. Tujuan dan manfaat dari kinerja keuangan daerah yakni untuk membuat perekonomian daerah lebih baik lagi. Berikut adalah tujuan dari pengukuran kinerja keunagan daerah antara lain : (1) Meningkatkan kinerja pemerintah. (2) Mengalokasikan sumber daya seta dalam hal pembuatan keputusan. (3) Memperbaiki komunikasi kelembagaan serta mewujudkan pertanggungjawaban publik.

Manfaat pengukuran kinerja keuangan antara lain : (1) Memberi informasi mengenai ukuran untuk menilai kinerja dari manajemen. (2) Penunjuk arah pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan.(3) Mengevaluasi serta memonitori kinerja dengan perbandingan skama kerjadengan pelaksanaannya. (4) Memecahkan dan menyelesaikan masalah yang ada. (5) Memahami kegiatan dalam dinas pemerintah. (6) Memastikan pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara yang objektif.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, pasal 156 ayat 1 tentang Pemerintah Daerah, Keuangan Daerah yakni hak serta kewajiban daerah yang penilaiannya dari uang dan sesuatu yang berupa uang dan barang yang menjadi milik daerah serta berkaitan dengan pelaksanaan hak maupun kewajiban tersebut. Dari pengertian tersebut keuangan daerah memuat unsur pokok sebagai berikut : (1) Hak di daerah yang bisa dinilai. (2) Kewajiban di daerah berhubungan dengan uang. (3) Kekayaan berkaitan dengan hak serta kewajiban tersebut.

Hak daerah terhadap keuangan daerah merupakan hak yang melekat dengan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang dipakai di dalam usaha pemerintah dalam mengisi kas daerah. Hak tersebut antara lain ; (1) UU No. 18 Tahun 1997 jo UU No. 34 Tahun 2000 hak menarik pajak daerah. (2) UU No 18 Tahun 1997 jo UU No.34 Tahun 2000 hak menarik retribusi/iuran daerah. (3) UU

No. 33 Tahun 2004 hak mengadakan pinjaman. (4) UU No. 33 Tahun 2004) hak memperoleh dan perimbangan dari pusat. Kewajiban daerah adalah bagian pelaksanaan tugas pemerintah pusat sesuai UUD 1945 ; (1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. (2) Memajukan kesejahteraan umum. (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa. (4) Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

## METODE PENELITIAN

### Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, menggunakan data sekunder data penelitian diambil dari berbagai situs resmi pemerintah di daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur sehingga data-data tersebut perlu diolah lagi. Mengukur variable menggunakan angka dan menganalisis data menggunakan prosedur statistik.

### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikenakan dalam penelitian ini adalah sekunder, data ini diambil melalui situs web Kementerian Keuangan serta Badan Pusat Statistik. Penelitian ini mengenakan data *time series crosssection* (polling data) dari beberapa pemerintahan di daerah dalam sektor Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terupload di Kementerian Keuangan serta Badan Pusat Statistik Indonesia periode 2019-2021.

### Instrumen penelitian

Instrumen penelitian ini menggunakan program aplikasi SPSS, dengan data yang diperoleh secara sekunder dari situs resmi pemerintahan daerah di Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

### Teknik Analisis

Pada penelitian ini analisis data dan hipotesis memanfaatkan bantuan program SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Pada hipotesis dipakai untuk menguji pengaruh dari variable independen terhadap variable dependen, dengan memakai dua uji yakni uji T yakni untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen dan uji F yakni untuk menguji apakah variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen. Rumus persamaan yang digunakan adalah

$$KK = \beta + \beta_1 PAD + \beta_2 BM + \beta_3 BBS + \beta_4 PE + \mu$$

Di mana :

KK	= Kinerja keuangan
$\beta$	= konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	= parameter
PAD	= Pendapatan asli daerah
BM	= Belanja Modal
BBS	= Belanja Bantuan Sosial
PE	= pertumbuhan ekonomi
$\mu$	= faktor gangguan ( <i>disturbance error</i> )

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Provinsi Jawa Timur terletak pada posisi 111<sup>00</sup> 114<sup>04</sup> Bujur Timur serta 7<sup>012</sup> sampai 8<sup>048</sup> Lintang Selatan, yang memiliki luas wilayah sebesar 47.963 km<sup>2</sup> dengan dua bagian utama yakni Jawa Timur daratan serta Kepulauan Madura. Luas wilayah daratan Provinsi Jawa Timur sebesar 88,70% atau sekitar 42.541 km<sup>2</sup>, sedangkan luas wilayah kepulauan sebesar 11,30% atau sekitar 5.422 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduk tercatat sebanyak 40.994.615 jiwa ditahun 2021. Secara administratif Provinsi Jawa Timur terdiri dari 38 Kabupaten/Kota, yaitu 29 Kabupaten dan 9 Kota, dengan Kota Surabaya sebagai Ibukota Provinsi.

Penelitian ini menggunakan 4 variabel dependen yaitu pendapatan asli daerah, belanja modal, belanja bantuan sosial dan pertumbuhan ekonomi, serta variabel dependen yakni kinerja keuangan yang secara deskriptif disajikan data beberapa daerah sebagai berikut ;

Pendapatan Asli daerah, Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) pertama Bojonegoro, wilayah Bojonegoro memiliki pendapatan asli daerah sebesar 561,25 Milyar di tahun 2019, 720,91 Milyar di tahun 2020, dan 1.021,50 Milyar atau 1,02 Triliun di tahun 2021 yang apabila dirata-rata wilayah Bojonegoro memiliki rata-rata pendapatan asli daerah sebesar 767,88 Milyar setiap tahunnya pada periode tahun 2019-2021 oleh Kementerian Keuangan Jawa Timur. Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) kedua yakni Jember , wilayah Jember memiliki pendapatan asli daerah sebesar 667,60 Milyar di tahun 2019, 593,18 Milyar di tahun 2020, dan 635,31 Milyar di tahun 2021 yang apabila dirata-rata wilayah Jember memiliki rata-rata pendapatan asli daerah sebesar 632,03 Milyar setiap tahunnya pada periode tahun 2019-2021 oleh Kementerian Keuangan Jawa Timur. Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) ketiga yakni Madiun, wilayah Madiun memiliki pendapatan asli daerah sebesar 229,21 Milyar di tahun 2019, 258,21 Milyar di tahun 2020, dan 333,15 Milyar di tahun 2021 yang apabila dirata-rata wilayah Madiun memiliki rata-rata pendapatan asli daerah sebesar 273,52 Milyar setiap tahunnya pada periode tahun 2019-2021 oleh Kementerian Keuangan Jawa Timur. Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) keempat yakni Malang, wilayah Malang memiliki pendapatan asli daerah sebesar 623,81 Milyar ditahun 2019, 583,85 Milyar di tahun 2020, dan 723,54 Milyar di tahun 2021 yang apabila dirata-rata wilayah Malang memiliki rata-rata pendapatan asli daerah sebesar 643,73 Milyar setiap tahunnya pada periode tahun 2019-2021 oleh Kementerian. Keuangan Jawa Timur. Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) kelima yakni Pamekasan, wilayah Pamekasan memiliki pendapatan asli daerah sebesar 219,67 Milyar di tahun 2019, 232,26 Milyar di tahun 2020, dan 411,90 Milyar di tahun 2021 yang apabila dirata-rata wilayah Pamekasan memiliki rata-rata pendapatan asli daerah sebesar 287,94 Milyar setiap tahunnya pada periode 2019-2021 oleh Kementerian Keuangan Jawa Timur.

Besar belanja modal yang dikeluarkan setiap wilayah berbeda-beda. Seperti Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) pertama yakni Bojonegoro, wilayah Bojonegoro memiliki belanja modal sebesar 1.304,76 Milyar atau (1,30 Triliun) di tahun 2019, 1.392,81 Milyar atau (1,39 Triliun) di tahun 2020, dan 1.619,93 Milyar atau (1,61 Triliun) di tahun 2021 yang apabila dirata-rata wilayah Bojonegoro memiliki rata-rata belanja modal sebesar 1.439,16 Milyar atau (1,43 Triliun) setiap

tahunnya pada periode tahun 2019- 2021 oleh Kementerian Keuangan Jawa Timur. Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) kedua yakni Jember, wilayah Jember memiliki Belanja modal sebesar 731,60 Milyar di tahun 2019, 188,31 Milyar ditahun 2020, dan 552,08 Milyar ditahun 2021 yang apabila dirata-rata wilayah Jember memiliki rata- rata belanja modal sebesar 467,33 Milyar setiap tahunnya pada periode tahun 2019-2021 oleh Kementerian Keuangan Jawa Timur. Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) ketiga yakni Madiun, wilayah Madiun memiliki belanja modal sebesar 357,95 Milyar di tahun 2019, 254,43 Milyar di tahun 2020, dan 183,41 Milyar di tahun 2021 yang apabila dirata-rata wilayah Madiun memiliki rata-rata belanja modal sebesar 265,26 Milyar setiap tahunnya pada periode tahun 2019-2021 oleh Kementerian Keuangan Jawa Timur. Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) keempat yakni Malang, wilayah malang memiliki belanja modal sebesar 808,65 Milyar di tahun 2019, 563,77 Milyar di tahun 2020, dan 439,41 Milyar ditahun 2021 yang apabila dirata-rata wilayah Malang memiliki rata-rata belanja modal sebesar 603,94 Milyar setiap tahunnya pada periode tahun 2019-2021 oleh Kementerian Keuangan Jawa Timur. Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) kelima yakni Pamekasan, wilayah Pamekasan memiliki belanja modal sebesar 399,61 Milyar di tahun 2019, 462,85 Milyar di tahun 2020, dan 638,40 Milyar ditahun 2021 yang apabila dirata-rata wilayah Pamekasan memiliki belanja modal sebesar 500,28 Milyar setiap tahun pada periode tahun 2019-2021 oleh Kementerian Keuangan Jawa Timur.

Data ketiga yang diambil penulis adalah belanja bantuan sosial. Data ini diambil penulis selain digunakan untuk mengukur kinerja keuangan, juga digunakan sebagai variabel pembaru atau yang biasa disebut *Gap*. Belanja bantuan sosial setiap wilayah berbeda-beda, Seperti Badan Koordinasi Wilayah(Bakorwil) pertama yakni Bojonegoro, wilayah Bojonegoro memiliki belanja bantuan sosial sebesar 18,11 Milyar di tahun 2019, 33,00 Milyar di tahun 2020, dan 205,10 Milyar di tahun 2021 yang apabila dirata-rata wilayah Bojonegoro memiliki rata-rata belanja bantuan sosial sebesar 85,40 Milyar setiap tahunnya pada periode tahun 2019-2021 oleh Kementerian Keuangan Jawa Timur. Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) kedua yakni Jember, wilayah Jember memiliki belanja bantuan sosial sebesar 202,43 Milyar di tahun 2019, 125,98 Milyar di tahun 2020, dan 47,18 Milyar di tahun 2021 yang apabila dirata-rata wilayah Jember memiliki rata-rata belanja bantuan sosial sebesar 125,19 Milyar setiap tahunnya pada periode tahun 2019-2021 oleh Kementerian Keuangan Jawa Timur. Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) ketiga yakni Madiun, wilayah Madiun memiliki belanja bantuan sosial sebesar 11,89 Milyar di tahun 2019, 11,09 Milyar di tahun 2020, dan 7,84 Milyar di tahun 2021 yang apabila dirata-rata wilayah Madiun memiliki rata-rata belanja bantuan sosial sebesar 10,27 Milyar setiap tahunnya pada periode tahun 2019-2021 oleh Kementerian Keuangan Jawa Timur. Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) keempat yakni Malang, wilayah Malang memiliki belanja bantuan sosial sebesar 41,29 Milyar di tahun 2019, 46,35 Milyar di tahun 2020, dan 69,66 Milyar di tahun 2021 yang apabila dirata-rata wilayah Malang memiliki rata-rata belanja bantuan sosial sebesar 52,43 Milyar setiap tahunnya pada periode tahun 2019-2021 oleh Kementerian Keuangan Jawa Timur. Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) kelima yakni Pamekasan, wilayah Pamekasan memiliki belanja bantuan sosial sebesar 8,81 Milyar di tahun 2019, 14,97 Milyar di tahun 2020, dan 34,63 Milyar di tahun 2021 yang apabila dirata-rata wilayah Pamekasan memiliki rata-rata belanja

bantuan sosial sebesar 19,47 Milyar setiap tahunnya pada periode tahun 2019-2021 oleh Kementerian Keuangan Jawa Timur.

Data keempat yang diambil oleh penulis adalah pertumbuhan ekonomi. Sama dengan tiga data sebelumnya, data ini digunakan penulis untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah di daerah. Apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah tinggi, maka dapat diartikan bahwa kinerja keuangan daerah tersebut dikatakan baik, sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi suatu daerah rendah, maka dapat diartikan bahwa kinerja keuangan daerah tersebut kurang baik. Pertumbuhan ekonomi setiap wilayah berbeda-beda. Seperti Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) pertama yakni Bojonegoro, wilayah Bojonegoro memiliki pertumbuhan ekonomi sosial sebesar 6,57% di tahun 2019, -9,98% di tahun 2020, dan 18,76% di tahun 2021, angka tersebut berasal dari Produk Domestik Regional Bruto tahun saat ini – Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya: Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya X 100%. Apabila dirata-rata pertumbuhan ekonomi wilayah Bojonegoro sebesar 5,11% setiap tahunnya pada periode tahun 2019-2021 oleh BPS Kabupaten Bojonegoro [53]. Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) kedua yakni Jember, wilayah Jember memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 5,51% di tahun 2019, -2,98% di tahun 2020, dan 6,61% di tahun 2021, angka tersebut berasal dari Produk Domestik Regional Bruto tahun saat ini – Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya: Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya X 100%. Apabila dirata-rata pertumbuhan ekonomi wilayah Jember sebesar 3,04% setiap tahunnya pada periode tahun 2019-2021 oleh BPS Kabupaten Jember [54]. Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) ketigayakni Madiun, wilayah Madiun memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 7,35% di tahun 2019, -0,08% di tahun 2020, dan 4,46% di tahun 2021, angka tersebut berasal dari Produk Domestik Regional Bruto tahun saat ini – Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya: Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya X 100%. Apabila dirata-rata pertumbuhan ekonomi wilayah Madiun sebesar 3,91% setiap tahunnya pada periode tahun 2019-2021 oleh BPS Kabupaten Madiun [55]. Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) keempat yakni Malang, wilayah Malang memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 5,49% di tahun 2019, -2,68% di tahun 2020, dan 3,11% di tahun 2021, angka tersebut berasal dari Produk Domestik Regional Bruto tahun saat ini – Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya: Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya X 100%. Apabila dirata-rata pertumbuhan ekonomi wilayah Malang sebesar 1,97% setiap tahunnya pada periode tahun 2019-2021 oleh BPS Kabupaten Malang [56]. Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) kelima yakni Pamekasan, wilayah Pamekasan memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 4,91% di tahun 2019, -2,53% di tahun 2020, dan 3,40% di tahun 2021, angka tersebut berasal dari Produk Domestik Regional Bruto tahun saat ini – Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya: Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya X 100%. Apabila dirata-rata pertumbuhan ekonomi wilayah Pamekasan sebesar 1,92% setiap tahunnya pada periode tahun 2019-2021 oleh BPS Kabupaten Pamekasan

Data terakhir yang diambil penulis adalah data kinerja keuangan. Data ini adalah data pelengkap dari keempat data lain dalam melakukan analisis. Kinerja keuangan setiap wilayah berbeda-beda. Seperti Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) pertama yakni Bojonegoro, wilayah Bojonegoro memiliki kinerja berasal dari Pendapatan Asli Daerah: Total Pendapatan Daerah X 100%. Apabila

dirata-rata kinerja keuangan wilayah Pamekasan sebesar 11,71% setiap tahunnya pada periode tahun 2019-2021 oleh Kementerian Keuangan Jawa Timur keuangan sebesar 11,77% ditahun 2019, 17,31% ditahun 2020, dan 17,30% di tahun 2021, angka ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah: Total Pendapatan Daerah X 100%. Apabila dirata-rata kinerja keuangan wilayah Bojonegoro sebesar 15,46% setiap tahun pada periode tahun 2019-2021 oleh Kementerian Keuangan Jawa Timur. Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) kedua yakni Jember, wilayah Jember memiliki kinerja keuangan sebesar 17,50% di tahun 2019, 16,80% ditahun 2020, dan 18,73% ditahun 2021, angka ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah: Total Pendapatan Daerah X 100%. Apabila dirata-rata kinerja keuangan wilayah Jember sebesar 17,67% setiap tahun pada periode tahun 2019-2021 oleh Kementerian Keuangan Jawa Timur. Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) ketiga yakni Madiun, wilayah Madiun memiliki kinerja keuangan sebesar 11,77% di tahun 2019, 14,01% ditahun 2020, dan 16,84% di tahun 2021, angka ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah: Total Pendapatan Daerah X 100%. Apabila dirata-rata kinerja keuangan wilayah Madiun sebesar 14,20% setiap tahunnya pada periode tahun 2019-2021 oleh Kementerian Keuangan Jawa Timur. Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) ketiga yakni Malang, wilayah Malang memiliki kinerja keuangan sebesar 15,19% di tahun 2019, 15,31% di tahun 2020, dan 17,69% di tahun 2021, angka ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah: Total Pendapatan Daerah X 100%. Apabila dirata-rata kinerja keuangan wilayah Malang sebesar 16,06% setiap tahunnya pada periode tahun 2019-2021 oleh Kementerian Keuangan Jawa Timur. Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) kelima yakni Pamekasan, wilayah Pamekasan memiliki kinerja keuangan sebesar 11,44% di tahun 2019, 12,73% di tahun 2020, dan 10,96% di tahun 2021, angka ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah: Total Pendapatan Daerah X 100%. Apabila dirata-rata kinerja keuangan wilayah Pamekasan sebesar 11,71% setiap tahunnya pada periode tahun 2019-2021.

Analisis uji regresi linear berganda diperoleh hasil sebagai berikut; Berdasarkan hasil uji T diperoleh nilai signifikansi variabel PAD sebesar 0,000 yang artinya ( $< 0,05$ ) sehingga variabel PAD berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel kinerja keuangan. Nilai signifikansi variabel belanja modal sebesar 0,000 yang artinya ( $< 0,05$ ) sehingga variabel belanja modal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel kinerja keuangan. Nilai signifikansi variabel belanja bantuan sosial sebesar 0,460 yang artinya ( $> 0,05$ ) sehingga variabel belanja bantuan sosial tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel kinerja keuangan. Nilai signifikansi variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 0,011 yang artinya ( $< 0,05$ ) sehingga variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel kinerja keuangan

### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda lebih tepatnya dalam uji T diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 nilai tersebut ( $< 0,05$ ). Dari hasil ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan suatu daerah. Hal ini dikarena pendapatan asli daerah merupakan angka strategis pendanaan internal daerah, kebutuhan suatu daerah dapat terpenuhi apabila pendapatan asli daerahnya stabil atau bahkan meningkat. Begitupun sebaliknya apabila pendapatan asli daerah terus mengalami penurunan, maka pemerintah

daerah akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan daerahnya, sehingga kinerja keuangan daerah pun akan menurun.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda uji T diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 nilai tersebut ( $<0,05$ ). Dari hasil ini menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini berkaitan dengan seberapa tinggi pendapatan asli daerah yang diperoleh. Apabila PAD tinggi maka belanja modal yang harus dikeluarkan juga tinggi, sehingga dengan semakin banyak belanja modal yang dikeluarkan semakin maju pula daerah tersebut. Belanja modal merupakan belanja yang wajib dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan sarana dan prasarana sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan dengan baik

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, uji T diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,460 nilai tersebut ( $>0,05$ ). Dari hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa belanja bantuan sosial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan suatu daerah. Hal ini dikarenakan belanja bantuan sosial adalah belanja yang dikeluarkan hanya untuk masyarakat yang mengalami resiko sosial. Belanja bantuan sosial adalah bantuan yang harus diberikan oleh pemerintah pusat dan bukan menjadi tanggungan pemerintah daerah. Tugas pemerintah daerah cukup mendata siapa sajaarganya yang berhak dan pantas untuk mendapatkan bantuan sosial, data tersebut kemudian akan diajukan ke pemerintah pusat untuk mencairkan bantuan tersebut, baik berupa uang maupun berupa barang. Selain itu, akibat wabah covid 19 membuat keuangan daerah mengalami penurunan. Hal ini membuat Pemerintah Daerah berupaya sangat keras agar masyarakat yang terkena covid 19 bisa kembali pulih, sehingga banyak keuangan daerah yang difokuskan dalam bidang kesehatan untuk penyembuhan dan pencegahan covid 19.

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, lebih tepatnya pada uji diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,011 nilai tersebut ( $<0,05$ ). Dari hasil uji tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kinerja keuangan suatu daerah. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan pendapatan daerah serta kinerja keuangan suatu daerah, apabila pendapatan daerah menurun maka pertumbuhan ekonomi suatu daerah menurun sehingga kinerja keuangan daerah tersebut ikut menurun. Begitupun sebaliknya apabila pendapatan daerahnya meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga meningkat sehingga kinerja keuangan suatu daerah pun juga meningkat

Dari empat variabel diatas terdapat satu variabel yang tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependent yaitu belanja bantuan sosial, padahal secara teori makro disampaikan bahwa semakin banyak pengeluaran dari sisi konsumsi (variabel C) maka akan meningkatkan sisi Pendapatan nasional (Y) hal ini bisa dijelaskan sebagai berikut ; (1) jumlah masyarakat yang mendapat program jejaring sosial hanya sebagian kecil saja dari jumlah keseluruhan masyarakat terdampak pandemi. Dari data Bank Dunia setidaknya terdapat 115 juta orang kelas menengah rentan di Indonesia, mereka baru terangkat dari kemiskinan tetapi belum secure secara ekonomi. Diketahui hanya 52 juta atau 20% dari 267 juta masyarakat Indonesia yang berada di level menengah keatas dengan pendapatan di posisi aman dari gejolak ekonomi. Tak jauh berbeda dengan kondisi di Jawa Timur, cakupan jaring pengaman sosial masih terbatas sehingga tidak berdampak signifikan pada kinerja keuangan daerah. (2) Nilai jaring pengaman sosial terlalu

kecil Rp.600ribu, garis kemiskinan versi BPS per September 2019 adalah Rp.440ribu per orang, jika dalam satu keluarga menanggung 4 orang maka minimal yang diterima harusnya Rp. 1,7juta untuk bisa bertahan hidup. Nominal tersebut perlu dipertimbangkan lagi untuk mereka yang hidup di kota besar pasti perlu ada tambahan pengeluaran yang lebih besar dibanding masyarakat yang hidup di daerah pedesaan atau pinggiran kota. Dilihat dari skala nasional besaran stimulus pemerintah masih terbilang kecil hanya 2,5% dari total PDB kita yaitu Rp. 405 Triliun. (3) Mekanisme penerima bersyarat (*conditional*) selain membatasi jumlah penerima bantuan, juga mencipatakan keruwetan, kekacauan data dan keterlambatan realisasi bantuan.

Dari tiga kondisi diatas sangat dimungkinkan bahwa variabel belanja bantuan sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah di Jawa Timur.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil olah data bisa diambil kesimpulan sebagai berikut ;

1. Variabel PAD, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah
2. Variabel belanja bantuan sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah
3. Tidak berpengaruhnya variabel belanja bantuan sosial terhadap kinerja keuangan karena adanya ketidakefektifan program bantuan dalam hal proporsi jumlah penerima bantuan, besaran nominal dan proses bersyarat penerima bantuan

## DAFTAR PUSTAKA

- Fahrudin, A. (2020). *Perubahan sosial ekonomi dimasa pandemi Covid 19*. Bandung: Refika Aditama.
- Ika Fahrika, J. R. (2020). Dampak pandemi covid 19 terhadap perkembangan makro ekonomi di indonesia. *Jurnal FEB Unmul*, 206-213.
- Priyono, T. C. (2016). *Esensi Ekonomi Makro*. Sidoarjo: Zifatama.
- Setyo Tri W, M. K. (2022). *Dinamika Ekonomi Pandemi dan Perubahannya di jawa Timur* . Malang: UB Press.
- Statistik, B. P. (2021). *Laporan Perekonomian Indonesia 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.